

PROBLEMATIKA MANAJEMEN BUMDES TETESAN MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LENGKONG KABUPATEN MOJOKERTO

Laila Ayu Junianda

UIN Sunan Ampel Surabaya

lailaayujunianda@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga yang bergerak pada kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan asli desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan problematika manajemen BUMDes Tetesan Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Lengkon. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Teori Fungsional Struktural - Robert K. Merton. Problematika memiliki arti sesuatu yang masih menimbulkan masalah yang belum dapat terselesaikan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa manajemen BUMDes Tetesan Mandiri belum sukses mengoperasionalkan BUMDes sesuai tujuan. Bentuk-bentuk usaha BUMDes Tetesan Mandiri terdiri dari usaha PPOB, persewaan kios, dan pembuangan sampah. Dampak BUMDes Tetesan Mandiri bagi kesejahteraan masyarakat desa Lengkon belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Analisis fungsional struktural pada pengelolaan BUMDes Tetesan Mandiri, terdiri dari konsekuensi fungsi, disfungsi, fungsi manifes, dan fungsi laten. Manajemen BUMDes belum menerapkan sistem sosial yang seimbang karena elemen-elemen tidak saling berintegrasi dan munculnya disfungsi yang terjadi pada sistem pengelolaannya.

KataKunci: *Problematika, Manajemen, Kesejahteraan Masyarakat, Fungsional Struktural*

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are institutions that engage in economic activities with the aim of generating original village income and improving community welfare. This research aims to describe the management problems of BUMDes Tetesan Mandiri in improving the welfare of the Lengkon village community. The method used is qualitative-descriptive with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Data analysis using Structural Functional Theory - Robert K. Merton. Problematics means something that still causes problems that cannot be resolved. The results of this research state that the management of BUMDes Tetesan Mandiri has not succeeded in operationalizing BUMDes according to its objectives. Tetesan Mandiri BUMDes business forms consist of PPOB business, kiosk rental, and waste disposal. The impact of BUMDes Tetesan

Article History: Received 25 March 2024, Revised 04 April 2024,

Accepted 28 Mei 2024, Available online 01 June 2024

Copyright: © 2024.Laila Ayu Junainda.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Mandiri on the welfare of the people of Lengkok village has not been felt as a whole by the community. Structural functional analysis of the management of BUMDes Tetesan Mandiri, consisting of the consequences of function, dysfunction, manifest function and latent function. BUMDes management has not implemented a balanced social system because the elements are not integrated with each other and dysfunction has emerged in the management system.

Keywords: *Problems, Management, Community Welfare, Structural Function*

A. Pendahuluan

Pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara membangun kemandirian sebagai tujuan utama dalam mengembangkan perekonomian desa. Pemerintah mempunyai sebuah misi untuk membangun wilayah pedesaan yang bisa dicapai dengan cara pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, kesiapan sarana dan fasilitas untuk menunjang perekonomian di desa, membentuk dan memperkuat lembaga yang menyokong rantai produksi dan pemasaran, juga pengoptimalan sumber daya menjadi basis pertumbuhan ekonomi pedesaan. Kemandirian desa bertujuan untuk membuka kesempatan bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai sumber penguatan ekonomi secara regional maupun nasional.

Desa sebagai bagian terkecil dari sebuah negara yang didalamnya terjalin hubungan secara langsung dengan masyarakat dan mereka memerlukan pelayanan aparat pemerintah dalam kehidupannya. Pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (saat ini disebut dengan UU Desa). Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dengan mempunyai batas wilayah masing-masing. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, salah satu cara bisa dilakukan melalui program kewirausahaan (*entrepreneurship*) dalam bentuk BUMDesa.¹ BUMDes adalah program pemerintah yang didirikan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi ekonomi negara terutama di wilayah desa.

Lembaga ekonomi desa atau disebut BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai upaya baru bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan

¹Rohani Budi Prihatin, Nurhadi Wiyono, "*BUMDES dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Cetakan Pertama*". (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 2, 2018), hal. 5-6.

masyarakat melalui kemandirian masyarakat desa. BUMDes menjadi pilar kegiatan ekonomi desa yang berperan sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Konsep lembaga sosial berkecimpung pada segala kegiatan BUMDes yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat dengan melakukan kontribusi untuk menyediakan pelbagai kebutuhan dan pelayanan sosial. Sementara itu pada konsep lembaga komersial berfokus pada orientasi keuntungan (*profit oriented*) melalui proses pengendalian potensi desa sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk pendapatan bagi desa.² Rancangan konsep diantara keduanya bisa berpengaruh dalam mekanisme pengendalian usaha sehingga dibutuhkan kedayagunaan dan efektivitas demi terwujudnya tujuan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola potensi desa melalui kegiatan usaha yang dimiliki.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintahan desa dengan cara memperkuat kegiatan ekonomi desa, BUMDes dibangun berlandaskan pada kebutuhan dan potensi desa.³ Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 terkait Badan Usaha Milik Desa yang berisikan tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, AD/ART, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penutupan kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.⁴ Menumbuhkan pendapatan asli desa melalui BUMDes bisa mendorong Pemerintah Desa mempersembahkan “*goodwill*” dalam menanggapi pendirian BUMDes. Adanya lembaga ekonomi yang berjalan di pedesaan, BUMDes diharapkan bisa memberikan pengaruh yang efektif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, melainkan juga bertujuan supaya tidak berkembangnya sistem usaha kapitalis diwilayah pedesaan yang bisa menimbulkan terusiknya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

²Rohani Budi Prihatin, Nurhadi Wiyono, "*BUMDES dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Cetakan Pertama*". (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 2, 2018), hlm.4.

³Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Badan Usaha Milik Desa*, 2007.

⁴Databese Pengaturan, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa," *peraturan.bpk.go.id*, accessed October 25, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id>.

Berdasarkan sumber data yang diambil dari situs kemendesa tahun 2023 terdapat 50.843 BUM Desa dan 5.265 BUM Desa Bersama dan total keseluruhan BUM Desa secara Nasional adalah 56.108 BUM Desa. BUM Desa di Jawa Timur terdapat 6.097 dan 498 BUM Desa Bersama, jadi total keseluruhan BUM Desa di Jawa Timur adalah 6.595 BUM Desa. Pada wilayah di Kabupaten Mojokerto BUM Desa terdapat 284 dan 17 BUM Desa Bersama total keseluruhan BUM Desa di Kabupaten Mojokerto yaitu 301 BUM Desa.⁵ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menargetkan pada tahun 2024 jumlah badan usaha milik desa (BUMDes) Berkembang bisa mencapai 10.000, BUMDes Maju mencapai 1.800, dan BUMDes Bersama Maju bertambah menjadi 200.⁶

Penelitian ini menjadikan BUMDes sebagai sasaran penelitian, Pembangunan BUMDes dimaksudkan untuk dapat meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi desa yang diberdayakan secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan desa sendiri. BUMDes Tetesan Mandiri Lengkok membuka peluang dalam meningkatkan pendapatan desa melalui penyewaan kios-kios oleh warga yang ingin berdaya dengan membuka usaha. Membuka pelayanan umum berupa pelayanan administrasi. BUMDes diharapkan mempunyai fungsi utama bagi desa melalui usaha masyarakat dan agenda kerjasama antar desa. Upaya meningkatkan perekonomian desa diperlukan suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi menciptakan suatu strategi yang teratur untuk mempermudah mengaktualkan tujuan BUMDes.

BUMDes Tetesan Mandiri mempunyai beberapa penyewaan kios yang berada di tepi jalan Desa Lengkok. Bentuk usaha penyewaan kios menjadi salah satu usaha yang cukup diminati warga desa Lengkok, karena bisa membantu warga desa yang ingin membuka usaha di tempat tersebut. Para penyewa kios mempunyai usaha yang beragam seperti menjual makanan, jajanan, toko kelontong, salon kecantikan, dan lain sebagainya. Tidak hanya usaha penyewaan kios BUMDes juga membuka pelayanan administrasi pembayaran apapun bagi masyarakat umum. Unit-unit usaha tersebut

⁵Sistem Informasi Desa, "BUM Desa Dan BUM Desa Bersama Nasional," *sid.kemendesa.go.id*, accessed November 25, 2023, <https://sid.kemendesa.go.id/bumdes>.

⁶Qonita Azzahra, "Perkembangan Jumlah BUMDes 2014-2020," *alinea.id*, accessed November 25, 2023, <https://data.alinea.id/perkembangan-jumlah-bumdes-2014-2020-b2c4G98z9b>.

diharapkan bisa membantu serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat desa Lengkon.

Perspektif fungsional struktural menjadi pendekatan yang akan digunakan untuk menjelaskan Problematika manajemen BUMDes sebagai instrumen fungsional yang dimiliki desa dalam terwujudnya proses kesejahteraan sekaligus keberdayaan. Fungsional struktural menerangkan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling terintegrasi dalam keseimbangan.⁷ BUMDes dalam hal ini tentu terdiri dari berbagai individu sebagai pengelola yang mempunyai fungsi masing-masing, oleh karena itu diperlukan jaringan dari pelbagai pihak internal desa, eksternal desa, dan masyarakat yang mempunyai keseragaman nilai dalam mewujudkan keseimbangan BUMDes. Fungsional struktural akan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai pengelolaan fungsinya pada BUMDes.

BUMDes didirikan di Desa Lengkon untuk membangkitkan perekonomian desa maupun aktivitas pelaku usaha. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat tema mengenai “Problematika Manajemen BUMDes Tetasan Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lengkon” dengan menggunakan perspektif struktural fungsional. Konsep fungsional struktural hadir ketika masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan kecenderungan kearah keseimbangan, yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Asumsi terkait berdirinya BUMDes yang masih banyak kendala dengan tidak berjalannya beberapa usaha yang dimiliki, kurangnya sumberdaya yang ahli untuk mengembangkan BUMDes, belum bisa memanfaatkan potensi lokal desa. Pendekatan struktural fungsional dibutuhkan dalam permasalahan yang dihadapi BUMDes dan menjadi suatu hal menarik untuk dikaji, sebab struktural fungsional Robert K. Merton menitikberatkan pada konsekuensi-konsekuensi objektif individu dalam perilakunya. Konsep utamanya terdiri dari fungsi, disfungsi, fungsi manifes, fungsi laten. Beberapa konsep utama tersebut dapat digunakan untuk mengetahui fungsi pada struktur BUMDes dan masyarakat secara nyata dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

⁷Muhamad Chairul Basrun Umanailo, “Kandungan Fungsi Keteraturan Dalam Struktural Fungsional Robert King Merto,” *Sosiologis: Kajian Sosiologi Klasik, Modern dan Kontemporer* 1, no. 4 (2023).

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, memakai jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan penelitian mengenai sebuah pemahaman terhadap fenomena yang diteliti secara mendalam untuk dapat dipahami.⁸ Peneliti berusaha untuk memahami gejala pada suatu peristiwa yang terjadi melalui sudut pandang objek yang diteliti. Menilai Problematika pada sistem manajemen, bentuk usaha, dan dampaknya bagi masyarakat melalui penjelasan objek penelitian, yaitu pengurus BUMDes Tetesan Mandiri dan masyarakat pelaku usaha. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yakni sampel dipilih berdasarkan penilaian subjektivitas peneliti dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebagai sasaran penelitian diantaranya yaitu: pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, dan masyarakat atau pelaku usaha di BUMDes Tetesan Mandiri Desa Lengkong. Dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini peneliti memakai teori fungsional struktural Robert K. Merton sebagai pisau analisis dalam menjelaskan problematika manajemen BUMDes Tetesan Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lengkong. Robert K. Merton merupakan seorang ahli sosiologi Amerika, beliau dikenal “sebagai bapak sosiologi modern”. Pemikiran penting Robert K. Merton yaitu mengenai struktur sosial dalam analisis sosiologis. Fungsional struktural memfokuskan pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kebudayaan. Fungsionalis struktural mulanya cenderung berfokus pada keseluruhan fungsi-fungsi struktur atau lembaga sosial yang satu untuk yang lainnya. Akan tetapi dalam pandangan Merton, fungsionalis struktural lebih terpusat pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif individu. Merton dalam hal ini menjelaskan bahwa fungsi-fungsi diartikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dicermati untuk digunakan beradaptasi atau penyesuaian pada suatu sistem tertentu.⁹

⁸Kafilah Imanina, “Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitis Dalam Paud”, *Jurnal AUDI : Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD JAI V* (1), (2020), <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/jpaud/article/view/3728>.

⁹George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Edisi kedelapan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 429.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Manajemen BUMDes Tetesan Mandiri

Manajemen BUMDes menjadi suatu hal yang penting dalam sistem operasional BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional yang didasarkan atas kehendak masyarakat dengan bersandar pada potensi desa. BUMDes sebagai lembaga sosial dan komersial bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan upaya mensejahterakan masyarakat. Penguatan ekonomi desa dapat diwujudkan melalui BUMDes dari unit usaha yang dimiliki. Namun, manajemen BUMDes Tetesan Mandiri mengalami kesulitan dalam operasionalnya. Munculnya beberapa problematika tata kelola yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes Tetesan Mandiri menjadi penghambat dalam proses pengembangan BUMDes. Berdasarkan problematika pada manajemen BUMDes Tetesan Mandiri yaitu sebagai berikut :

1) Keterbatasan modal BUMDes

Modal usaha adalah segala bentuk uang yang digunakan untuk berdagang dan bertransaksi dalam menunjang berdirinya suatu usaha yang bisa menghasilkan harta benda, sehingga terjadi penambahan kekayaan. Aset sebagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan ketika melaksanakan proses operasi. Dalam hal ini aset dapat disebutkan dari segi bentuknya aset berwujud (gedung, meja, kursi, lemari, komputer, surat berharga, uang kas, dll) dan aset tak berwujud (aset yang tidak mempunyai wujud namun memiliki nilai yang dapat ditukarkan seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan kekayaan intelektual). Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang dimaknai dengan aset BUMDes adalah harta atau kekayaan Milik BUMDes, baik yang berupa maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang secara berwujud maupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Modal usaha BUMDes Tetesan Mandiri desa Lengkon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto memperoleh penyertaan modal dari Dana Desa sebesar seratus juta rupiah pada tahun 2019. Dana tersebut dialokasikan pada produk masker saat terjadi pandemi covid-19 yang membuka peluang usaha pertama BUMDes Tetesan Mandiri. Usaha produk masker pada saat terjadi pandemi covid-19

cukup menguntungkan tetapi hasil tersebut digunakan untuk menutupi minus pembayaran jasa pembuangan sampah. Laporan kas BUMDes terakhir tahun 2023 berkisar 6 juta. Pada tahun ini sampah masih terjadi minus sampai 3,8 juta, jadi kas BUMDes dikurangi untuk minus pembuangan sampah hingga tersisa 2,6 juta saja. Pembangunan unit usaha persewaan kios BUMDes Tetesan Mandiri mendapatkan modal dari dana desa sebesar tiga lima juta rupiah.

Pengurus BUMDes belum mempunyai kemampuan untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak ketiga seperti investor, perbankan, BUMN/BUMD dan sektor UMKM. Minimnya modal mengakibatkan BUMDes tidak maksimal untuk meningkatkan layanan sosial dan ekonomi kepada masyarakat secara merata, maka dari itu BUMDes Tetesan Mandiri membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan layanan dan tambahan modal untuk membuka usaha baru. Perlunya perhatian pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan permodalan. BUMDes dapat memanfaatkan dana dari CSR perusahaan yang berada di desa Lengkong untuk digunakan dalam pengembangan unit usaha BUMDes Tetesan Mandiri. Pengelola diharapkan bisa membangun jaringan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal untuk berpeluang dapat memberikan dana penyertaan modal kepada BUMDes.

2) Rekrutmen pengurus yang tidak sesuai dengan kebutuhan BUMDes

Pengurus merupakan sumber daya manusia yang terpenting bagi organisasi. Kemampuan harus dimiliki oleh sumber daya manusia seperti pengambilan keputusan, penentuan tujuan, pelaksanaan pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Keberhasilan pada organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran, dan tantangan internal dan eksternal sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber daya manusianya. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berorientasi profit dan sosial harus didukung oleh SDM yang berkompeten dan profesional. Proses rekrutmen pengurus BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa, pengurus BUMDes dipilih oleh masyarakat desa sesuai dengan kriteria yang disepakati. Penentuan pengurus BUMDes telah dilaksanakan dengan baik sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi dalam pelaksanaannya pengurus yang terpilih belum

dapat mengantarkan BUMDes pada tujuan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan musyawarah desa terkait penetapan pengurus BUMDes telah dipilih sesuai pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Tetapi untuk pelaksanaan yang dilakukan pengurus BUMDes belum berjalan sesuai tujuan. Pengelola atau pengurus BUMDes sebaiknya mempunyai kemampuan dalam pengelolaan atau setidaknya mempunyai pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Pembangunan desa yang tidak berkembang karena terjadinya krisis SDM dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes Tetasan Mandiri tidak berjalan baik, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa untuk merealisasikan pembangunan unit usaha BUMDes yang dapat memberikan manfaat bagi desa maupun masyarakat.

3) Pengembangan Potensi Desa yang Tidak Maksimal

Pembentukan BUMDes adalah penentuan bidang usaha yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan didukung oleh potensi desa. Desa Lengkong memiliki berbagai potensi beragam yang dapat dikembangkan. Unit usaha BUMDes Tetasan Mandiri berjalan pada pelayanan PPOB dan persewaan kios usaha. Berdasarkan hasil observasi pada aktivitas ekonomi BUMDes Tetasan Mandiri masih terlihat sepi. Pelayanan PPOB BUMDes Tetasan Mandiri jarang mendapatkan pelanggan sebab eksistensinya belum meluas karena tidak adanya media informasi yang diperlihatkan pada masyarakat. Begitu juga dengan usaha persewaan kios yang berjumlah 18 kios, tetapi hanya 9 kios yang saat ini disewa oleh pelaku usaha.

Pengembangan potensi pada desa harus dilakukan dengan baik agar pembangunan unit usaha BUMDes dapat menghasilkan pendapatan asli desa dan menyejahterakan masyarakat. Pemetaan suatu wilayah perlu dilakukan untuk lebih tepat dalam mengenali potensi yang dimiliki desa. Pada kenyataannya desa Lengkong tidak memiliki pemetaan potensi wilayah secara spesifik untuk dapat dianalisis berdasarkan potensi lokal desa. Pembangunan bidang atau unit usaha BUMDes Tetasan Mandiri melalui pemanfaatan tanah khas

desa dengan mendirikan usaha pelayanan PPOB dan persewaan kios. Banyak potensi sebenarnya yang bisa dikelola pengurus BUMDes karena Desa Lengkong merupakan wilayah strategis yang berada pada perbatasan Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo.

4) Kurangnya Inovasi Pemerintah dan Pengurus BUMDes

Inovasi pemerintah dan pengurus BUMDes merupakan kemampuan menciptakan suatu hal yang baru harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Inovasi diperlukan sebagai instrument percepatan dalam membuat terobosan untuk menjadi solusi peningkatan kualitas BUMDes yang berfokus mendekatkan kepada harapan masyarakat. Pemerintah desa Lengkong dan pengurus BUMDes Tetesan Mandiri belum mempunyai inovasi untuk membangun BUMDes sebagai lembaga komersial yang memberikan keuntungan berupa pendapatan Desa dan sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara merata dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan.

Bentuk inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDes Tetesan Mandiri antara lain : 1) Pelembagaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa, 2) Penggerak inisiatif masyarakat untuk membangun BUMDes secara bersama-sama. 3) Mendorong pengelolaan BUMDes untuk ditangani oleh masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman serta rekam jejak penilaian yang baik. 4) Membangun konsolidasi secara internal dan eksternal dengan kemitraan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. 5) Persamaan satu visi dalam mendorong dan meyakinkan pemerintah desa untuk bersama-sama menjadikan BUMDes sebagai produk unggulan Desa dalam rangka pemberdayaan kesejahteraan masyarakat Desa. 6) Peningkatan kapasitas dan kompetensi BUMDes serta pengembangan manajemen bisnis melalui pelatihan, bimtek dan pendampingan oleh perguruan tinggi.

5) Keterbatasan Kapasitas Pengelola BUMDes

Kapasitas membuktikan tingkat kemampuan berproduksi secara optimal dalam mengembangkan lembaga atau organisasi yang maju. Kapasitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan SDM pengelola BUMDes. Hasil wawancara dengan pengurus

BUMDes mengatakan bahwa pengelola BUMDes Tetesan Mandiri telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis tata kelola BUMDes pada level nasional, provinsi, dan kabupaten, namun belum menghasilkan manfaat bagi BUMDes Tetesan Mandiri. Bimbingan teknis sudah 3 kali dilakukan pengelola BUMDes diantaranya di Jawa Tengah, Kediri, dan Banyuwangi untuk belajar membangun usaha yang berhasil pada BUMDes.

Pernyataan salah satu pengurus BUMDes bahwa pelatihan dan bimtek sudah diikuti berkali-kali tetapi tidak memberikan kontribusi praktis karena bentuk pelatihan berupa teori, sehingga sulit untuk bisa diaplikasikan. Pelatihan yang produktif seharusnya dibarengi dengan praktek langsung melalui pendampingan oleh mentor atau pelatih. Pelatihan dengan sistem pendampingan sangat efektif untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes. Pengelolaan BUMDes Tetesan Mandiri hanya bermodalkan pada potensi desa dan kapasitas pengurus BUMDes yang kurang mumpuni. Kebijakan regulasi harus dibuat oleh pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan pada pengelolaan BUMDes. Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dalam bentuk pengabdian masyarakat dan pengembangan riset.

6) Kelembagaan yang Belum Stabil

Aspek administrasi dan kelembagaan BUMDes Tetesan Mandiri sudah terdaftar berbadan hukum, namun dalam operasional tata kelola belum sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan BUMDes. Kegiatan pengawasan atau monitoring unit usaha, pertemuan rutin 3 bulan sekali untuk pembahasan perkembangan unit usaha, hingga evaluasi sudah tidak berjalan. Kepemimpinan BUMDes Tetesan Mandiri sangat tidak transparan serta komunikasi antara ketua BUMDes dengan Pemerintah Desa kurang aktif. Kelembagaan BUMDes Tetesan Mandiri berada pada kondisi tertatih-tatih yang sangat memprihatinkan karena tidak ada tindakan solutif dari pemerintah desa.

Problematis pada kelembagaan BUMDes Tetesan Mandiri yang belum stabil tentu menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDes. Pemerintah desa harus berperan dalam mensukseskan program BUMDes Tetesan Mandiri dengan mewajibkan masyarakat Desa

Lengkong menggunakan produk barang atau jasa dari BUMDes. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Cooperate Governace* (transparan, partisipatif, demokratis, dan taat pada aturan hukum). Penguatan usaha berbasis potensi desa dan penguatan literasi informasi bagi pengelola BUMDes Tetesan Mandiri.

7) Bentuk Usaha BUMDes Tetesan Mandiri

BUMDes dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal desa dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi desa. Perencanaan pembangunan ekonomi disuatu wilayah harus berpegang pada sumberdaya atau potensi lokal desa. Potensi lokal desa merupakan segala kekuatan dan kemampuan dari berbagai aspek yang bisa jadi dikembangkan dalam mencapai tujuan pembangunan.¹⁰ Pendirian BUMDes Tetesan Mandiri mendapatkan modal dari dana desa (DD) untuk dibangun unit usaha yang sekiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Lengkong.

Unit usaha yang dimiliki desa diharapkan bisa memberikan manfaat bagi desa maupun masyarakat desa Lengkong. Tujuan utama BUMDes adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut bisa dirasakan masyarakat apabila unit usaha BUMDes maju dan berjalan lancar, sehingga menghasilkan pendapatan asli desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa serta pemberdayaan sumber daya manusia. Bentuk-bentuk usaha BUMDes Tetesan Mandiri diantaranya sebagai berikut :

a) Pelayanan Pembayaran PPOB

Usaha PPOB dapat memudahkan masyarakat desa Lengkong untuk melakukan pembayaran secara cepat dan dekat dengan tempat tinggal warga desa. Pelayanan pembayaran berada di kantor BUMDes Tetesan Mandiri yang melayani berbagai transaksi seperti setor tunai, pulsa all operator, listrik, isi pulsa token, SPPT pajak, wifi dan jasa cetak foto, pengetikan, print & fotocopy. Pelayanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat desa Lengkong dan sekitarnya guna memudahkan akses penyediaan layanan jasa transaksi.

¹⁰Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, and Yeti Lis Purnamadewi, "Pemilihan Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya Sesuai Dengan Potensi Lokal Di Desa Pagelaran," *Jurnal Benefita* 5, no. 1 (March 5, 2020): 101.

Eksistensi usaha PPOB BUMDes ini kurang diketahui oleh masyarakat desa Lengkong sendiri, karena tidak adanya media untuk mempromosikan usaha PPOB ini. Hanya orang yang mengenal BUMDes yang mengetahui usaha pelayanan pembayaran PPOB. Sehingga mayoritas masyarakat desa Lengkong masih melakukan transaksi pembayaran diluar sana. Operasional pelayanan juga dirasa kurang optimal karena jam buka dan tutup yang tidak menentu. Akibat dari beberapa faktor tersebut unit usaha PPOB sepi dan hanya melayani sebagian orang saja. Pendapatan usaha PPOB masih belum menerima keuntungan yang maksimal, maka diperlukan kerjasama diantara berbagai pihak yang terlibat untuk bisa mempromosikan secara luas usaha PPOB kepada masyarakat desa Lengkong.

b) Persewaan Kios Usaha

Usaha penyewaan kios-kios dapat memberikann peluang bagi masyarakat desa Lengkong untuk berwirausaha. BUMDes memiliki kios persewaan berjumlah 18 kios tetapi hanya 9 kios yang tersewa oleh pelapak. Usaha persewaan kios cukup membantu masyarakat desa Lengkong untuk memberikan tempat berwirausaha. BUMDes membuka kesempatan bagi warga desa untuk produktif berdagang, sehingga keberadaan BUMDes bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di desa. Banyaknya peluang potensi yang dimiliki desa Lengkong mengenai unit usaha yang bisa dikelola oleh BUMDes, tetapi untuk pelaksanaan masih belum terealisasi dengan mudah. Tidak adanya modal lebih untuk membentuk unit usaha. Kegiatan BUMDes Tetesan Mandiri sejauh ini masih beroperasi pada unit-unit usaha persewaan kios dan pelayanan pembayaran. Unit usaha kios BUMDes Tetesan Mandiri setidaknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin mendirikan usaha tetapi tidak memiliki tempat, meskipun hasil dari persewaan kios yang terbilang masih kurang untuk pendapatan asli desa sendiri.

BUMDes Tetesan Mandiri sempat ingin menjalin kerjasama dengan beberapa pengusaha yang ada di Desa Lengkong dalam bidang pertanian, usaha peralatan hajatan, dan pengepul limbah pabrik yang berada disekitar desa. Tetapi rencana tersebut sampai saat inipun masih belum terlaksana, karena tata kelola atau manajemen BUMDes Tetesan Mandiri belum optimal secara keseluruhan. Kondisi usaha persewaan kios ternyata tidak semulus yang direncanakan

karena banyak komplain terkait biaya persewaan kios. Pengurus BUMDes kurang memerhatikan penyewa kios dan tidak adanya monitoring untuk memantau perkembangan unit usaha. Sehingga banyak pelapak yang mundur untuk berdagang di kios BUMDes.

c) Pembuangan Sampah

Program BUMDes terkait pembuangan sampah di Desa Lengkong diserahkan oleh pemerintah desa kepada Pengurus BUMDes. Setiap KK atau keluarga di desa Lengkong harus membayar iuran pembuangan sampah untuk dapat diangkut ke TPA. Program ini penting untuk dilakukan agar masyarakat terbantu dan tidak membuang sampah sembarangan. Pembayaran sampah ini dilakukan setiap bulannya sebesar 11 ribu rupiah melalui RT masing-masing selanjutnya RT menyetorkan kepada bendahara BUMDes untuk membayar tenaga kerja pengangkut sampah, mobil kontainer sampah beserta biaya perawatan, bensin, dan biaya pembuangan sampah ke DLH.

Pengangkutan sampah masyarakat desa Lengkong ditangani oleh BUMDes bertujuan agar lingkungan desa Lengkong bersih dan nyaman, sebab sebelumnya tidak ada pengelolaan sampah yang teratur mengakibatkan masyarakat desa Lengkong membuang sampah sembarangan di lingkungan persawahan. Tidak adanya lahan untuk pembuangan sampah warga Desa Lengkong mengakibatkan pengurus BUMDes kesusahan apabila harus memilah sampah untuk dijadikan sebuah produk yang bernilai secara ekonomis. Sistem pengangkutan sampah yang kini dilakukan 2 hari sekali diangkut kemudian langsung dibuang ke TPA.

Permasalahan sampah yang terjadi di desa Lengkong kurang mendapatkan perhatian pemerintah desa. Masih banyak kecurangan yang dilakukan, terdapat warga desa Lengkong yang tidak mau membayar iuran pembuangan sampah karena beralasan tidak ikut membuang ke tempat sampah yang disediakan di jalanan depan rumah. Kenyataannya mereka ikut membuang sampah ditempat yang telah disediakan dengan membuang sampah pada malam hari agar tidak diketahui masyarakat lain. Pengurus BUMDes dalam hal ini sudah melaporkan ke pemerintahan desa tetapi tetap tidak

mendapatkan solusi dan tidak adanya ketegasan kepala desa terhadap masyarakat yang tidak ikut mendukung program sampah ini.

Pada tahun 2024 terdapat rencana program pemilahan sampah. Sampah dikumpulkan lalu dipilah sesuai jenis masing-masing sampah. Bantuan wilayah atau tempat pemilahan dan mesin akan diberikan pemerintah untuk bisa mendapatkan *income*. Pemerintah desa, pengurus BUMDes dan seluruh masyarakat desa Lengkong seharusnya saling bekerjasama mendukung pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis. Menciptakan produk-produk dari barang bekas yang bisa dimanfaatkan kembali. Dengan hal itu, BUMDes Tetesan Mandiri dapat memanfaatkan potensi lokal dari sampah rumah tangga dengan menghasilkan uang yang dapat menambah pendapatan asli desa.

2. Dampak BUMDes Tetesan Mandiri Bagi Masyarakat Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan fakta di lapangan BUMDes Tetesan Mandiri masih belum dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat desa secara luas. Terdapat banyak faktor yang menjadi kendala BUMDes Tetesan Mandiri untuk bisa mengembangkan unit usahanya. Masyarakat belum sepenuhnya bisa merasakan kesejahteraan terkait adanya BUMDes. BUMDes Tetesan Mandiri sejauh ini dapat dikatakan masih merintis dengan kondisi tertatih-tatih, dimana belum memiliki pondasi SDM yang unggul untuk bisa mengembangkan potensi desa dengan baik. Kebijakan regulasi tidak ditekankan oleh pemerintah desa dalam membangun persepsi masyarakat desa. Kesadaran masyarakat yang kurang dan pelaksanaan tidak dilakukan karena alasan terhalang oleh modal.

Sebenarnya unit usaha yang dimiliki BUMDes Tetesan Mandiri cukup membantu masyarakat walaupun sangat kecil kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Usaha PPOB BUMDes membantu bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi pembayaran apapun dengan jarak yang dekat dengan rumah tanpa harus ke indomaret atau alfamart. Namun usaha tersebut kurang diketahui oleh masyarakat desa Lengkong karena di kantor BUMDes tidak ada media seperti banner yang bisa dipasang didepan kantor BUMDes. Usaha persewaan kios juga sedikit membantu masyarakat desa Lengkong yang ingin membuka usaha, BUMDes disini menyediakan tempat untuk disewa oleh pelaku usaha. Meskipun unit usaha BUMDes ini memperoleh

pendapatan dari beberapa usaha diatas, BUMDes Tetesan Mandiri belum mendapatkan keuntungan sehingga BUMDes belum bisa memberikan pendapatan asli desa dari usahanya apalagi untuk kesejahteraan masyarakat. Keuntungan BUMDes masih sangat sedikit jadi dimasukkan ke kas BUMDes sendiri, namun sering terjadi minus keuangan dalam pembuangan sampah karena masyarakat tidak mau membayar iuran sampah yang seharusnya wajib bagi masyarakat desa Lengkong.

Masyarakat desa Lengkong belum merasakan kesejahteraan dari adanya BUMDes Tetesan Mandiri. Beberapa program unit usaha BUMDes yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan yaitu program iuran sampah setiap keluarga untuk pengangkutan sampah masyarakat yang dibuangkan ke TPA. Program persewaan kios bisa dirasakan oleh para pelaku usaha dengan membuka usaha di kios BUMDes Tetesan Mandiri. Pelayanan PPOB juga dirasakan masyarakat desa yang menggunakan jasa transaksi pembayaran BUMDes Tetesan Mandiri. Program-program BUMDes tersebut hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat desa Lengkong dan itupun masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal ini pemerintah desa harus meningkatkan SDM pengelola maupun masyarakatnya untuk bisa berpartisipasi membangun BUMDes serta mengoperasionalkan rencana unit usaha baru untuk menumbuhkan perekonomian desa dan masyarakat.

Solusi Problematika Manajemen BUMDes Tetesan Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa harus membuat kebijakan regulasi yang jelas bagi sistem pengelolaan BUMDes Tetesan Mandiri.
- b. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes Tetesan Mandiri.
- c. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas permasalahan pengelolaan BUMDes Tetesan Mandiri dengan seluruh pihak-pihak yang berpengaruh dan masyarakat/pelaku usaha.
- d. Memanfaatkan dana CSR Perusahaan/BUMN untuk mengembangkan unit usaha BUMDes Tetesan Mandiri.
- e. Menjalin kemitraan dengan beberapa lembaga ekonomi, sosial, perguruan tinggi sebagai program pengabdian masyarakat

untuk mengeksistensi Desa Lengkong maupun memberikan manfaat bagi BUMDes Tetesan Mandiri.

f. Membangun persepsi masyarakat untuk turut berpartisipasi menghidupkan program BUMDes Tetesan Mandiri.

g. Memberikan fasilitas pelatihan SDM bagi pengelola BUMDes dan masyarakat desa Lengkong untuk dapat memberikan kontribusi kepada desa Lengkong dan BUMDes Tetesan Mandiri.

3. Problematika Manajemen BUMDes Tetesan Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lengkong – Tinjauan Teori Fungsional Struktural Robert K. Merton

Struktural Fungsional Robert K. Merton memfokuskan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan budaya. Fungsioanalisis struktural awal memfokuskan perhatian pada fungsi satu struktur sosial atau pada fungsi satu institusi sosial tertentu saja. Menurut Merton, fungsi diartikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang bisa diamati dengan memunculkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Tetapi, tentu ada bias ideologis apabila orang hanya memfokuskan perhatian pada adaptasi atau penyesuaian diri, karena adaptasi selalu mempunyai akibat positif. Patut diperhatikan bahwa satu faktor sosial bisa berakibat negatif terhadap fakta sosial lain. Untuk memperbaiki kelengahan dalam fungsioanalisme struktural awal ini, Merton mengembangkan gagasan mengenai disfungsi. Sebagaimana struktur atau institusi pun dapat menimbulkan akibat negatif terhadap sistem sosial.¹¹

Pada penelitian ini membahas Problematika Manajemen BUMDes Tetesan Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lengkong. Problematika berarti permasalahan yang dialami BUMDes dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa Lengkong. BUMDes disini mempunyai tata kelola yang dilaksanakan pengurus BUMDes sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing pada struktur manajemen BUMDes. Fungsional struktural Robert K. Merton menjelaskan gagasannya terkait konsekuensi fungsi (positif) dan disfungsi (negatif). Pandangan Fungsional Struktural Robert K. Merton dalam analisis konsekuensi fungsi dan disfungsi pengelolaan BUMDes Tetesan Mandiri, adalah sebagai berikut :

¹¹George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, ed. Tri Wibowo Budi Santoso, 6th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

1) Fungsi Pengelolaan BUMDes Tetesan Mandiri

Pengelolaan BUMDes memiliki struktur kepengurusan dengan bagian atau fungsi masing-masing. Pengurus BUMDes Tetesan Mandiri menjalankan fungsi pengelolaan BUMDes yang pertama dengan mendirikan unit usaha yang akan menghasilkan pendapatan asli desa. Pelaksanaan pembangunan unit usaha diatas tanah khas desa yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.

Langkah awal pengurus BUMDes membangun usaha persewaan sejumlah 18 kios. Hal tersebut menarik perhatian masyarakat atau pelaku usaha yang ingin berwirausaha. Usaha kedua yaitu pelayanan PPOB yang melayani berbagai transaksi pembayaran, pelayanan tersebut memudahkan masyarakat desa Lengkong. Ada juga unit pembuangan sampah dengan membayar iuran setiap bulan untuk membersihkan lingkungan masyarakat desa Lengkong. Fungsi operasional pembangunan unit usaha persewaan kios, PPOB dan pengelolaan sampah telah dilaksanakan pengurus BUMDes Tetesan Mandiri.

2) Disfungsi Pengelolaan BUMDes Tetesan Mandiri

Sebagaimana struktur atau institusi pun dapat memunculkan akibat negatif terhadap sistem sosial. Pengelolaan BUMDes tidaklah berjalan mulus sesuai dengan perencanaan awal, karena pada perkembangannya BUMDes sering mengalami kendala atau permasalahan. Pengurus BUMDes aktif menjalankan pengelolaan unit usaha pada awal didirikannya BUMDes dan setelah beberapa tahun berdiri pengelolaan kurang aktif.

BUMDes Tetesan Mandiri hanya mempunyai usaha persewaan kios dan pelayanan PPOB. Usaha PPOB memberikan pelayanan pembayaran, setiap bulannya kurang lebih hanya 10 pengguna jasa tersebut. Persewaan kios juga banyak dari pelaku usaha yang mundur atau sudah tidak menyewa kios akibat harga sewa mahal. Begitu juga dengan pengelolaan sampah, terdapat warga yang tidak ikut membayar iuran tetapi membuang sampah ditempat yang disediakan pengelola BUMDes. Hal-hal tersebut yang mengakibatkan disfungsi pada sistem pengelolaan BUMDes.

Merton juga memperkenalkan konsep fungsi manifes dan fungsi laten. Kedua fungsi tersebut menjadi tambahan penting dalam analisis fungsional. Istilah sederhana fungsi manifes adalah yang disengaja, sementara fungsi laten tidak disengaja. Suatu tindakan-tindakan tentu memiliki konsekuensi yang disengaja maupun tidak disengaja. Meskipun setiap individu sadar terhadap konsekuensi-konsekuensi yang disengaja, analisis sosiologis dibutuhkan untuk mengungkapkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak sengaja.¹²

Berikut analisis teori Fungsional Struktural Robert K. Merton pada konsep fungsi manifes dan fungsi laten BUMDes Tetesan Mandiri :

1. Fungsi manifes BUMDes Tetesan Mandiri

Fungsi manifes atau fungsi yang disengaja, rencana dan tujuan dari didirikannya BUMDes yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Upaya BUMDes tersebut mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mendirikan unit usaha berdasarkan potensi lokal desa yang dapat membantu masyarakat. Kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama dalam program unit usaha BUMDes. Produk dan jasa BUMDes Tetesan Mandiri diharapkan dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat desa Lengkong. Pengelolaan BUMDes akan mengupayakan secara produktif kegiatan ekonomi bagi masyarakat desa Lengkong. Fungsi manifes ini sebagai perencanaan kegiatan ekonomi oleh BUMDes dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa Lengkong.

2. Fungsi laten BUMDes Tetesan Mandiri

Fungsi laten atau fungsi yang tidak sengaja, timbulnya permasalahan yang menghambat proses berjalannya usaha BUMDes. Kekurangan tenaga ahli pada bidang yang ditentukan. Keahlian dan kemampuan SDM menjadi faktor penting dalam mengelola unit usaha BUMDes. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan SDM perlu dilakukan secara rutin sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pada operasional BUMDes Tetesan Mandiri ini kurang adanya inovasi dan kreativitas pengelolanya dalam mengembangkan unit usaha. Fungsi

¹²George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* Edisi kedelapan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2012), h. 434.

laten yang terjadi pada BUMDes Tetesan Mandiri ini kurangnya kompetensi dan tindakan pelaksanaan tidak efektif dari pengelolaannya. Merton berargumen bahwa tidak semua struktur pastinya akan diperlukan untuk bekerjanya sistem sosial. Pada bagian-bagian sistem sosial kita dapat dienyapkan. Maka teori fungsional struktural dapat membantu mengatasi hal-hal bias konservatif, dengan mengakui bahwa beberapa struktur dapat diperluas. Fungsionalisme struktural membuka jalan terhadap perubahan sosial yang bermakna.¹³ Pengelolaan BUMDes Tetesan Mandiri, berdasarkan analisis fungsional struktural - Robert K. Merton dapat terus dikembangkan secara inovatif dan kreatif untuk dapat membangun unit usaha yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa Lengkok dengan memperbaiki disfungsi yang terjadi pada BUMDes Tetesan Mandiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan diatas yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwasan manajemen BUMDes Tetesan Mandiri mengalami beberapa permasalahan yang menimbulkan tidak efisiennya operasional yang dilakukan. Problematika pengelolaan diantaranya keterbatasan modal, rekrutmen pengurus yang tidak sesuai dengan kebutuhan BUMDes, pengembangan potensi desa yang tidak maksimal, kurangnya inovasi pemerintah dan pengurus BUMDes, keterbatasan kapasitas pengelola BUMDes, dan kelembagaan yang belum stabil. Kerjasama diantara pemdes, pengurus BUMDes, dan pihak-pihak yang berpengaruh lainnya belum menciptakan persamaan satu visi untuk mengembangkan BUMDes. Sehingga sistem pengelolaan BUMDes kurang optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi.

Bentuk – bentuk usaha BUMDes Tetesan Mandiri terdiri dari usaha ppob yang melayani transaksi pembayaran, persewaan kios bagi masyarakat atau pelaku usaha yang ingin berwirausaha, dan pengelolaan sampah rumah tangga dengan membayar iuran setiap bulan untuk jasa pembuangan ke TPA. Unit-unit usaha BUMDes Tetesan Mandiri belum menghasilkan keuntungan lebih dari pendapatannya karena karena BUMDes Tetesan Mandiri hanya mempunyai 3 unit usaha saja. Unit pengelolaan sampah pun selalu minus

¹³George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Edisi kedelapan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 435.

keuangan setiap bulan, jadi BUMDes ini belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dampak BUMDes Tetesan Mandiri bagi kesejahteraan masyarakat desa Lengkong belum dirasakan secara merata. Adanya persewaan kios cukup membantu masyarakat yang ingin membuka usaha, meskipun masih terdapat pelaku usaha yang keberatan dengan harga sewa kios yang terbilang mahal. Usaha ppob juga bisa memudahkan masyarakat desa Lengkong dalam melakukan transaksi pembayaran. Serta jasa pembuangan sampah ke TPA.

Daftar Pustaka

- Databese Pengaturan. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa.” *Peraturan.Bpk.Go.Id*. Last modified October 25, 2023. Accessed November 25, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- George Ritzer. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Kedelapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hidayah, Ulul, Sri Mulatsih, and Yeti Lis Purnamadewi. “Pemilihan Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya Sesuai Dengan Potensi Lokal Di Desa Pagelaran.” *Jurnal Benefita* 5, no. 1 (March 5, 2020): 101.
- Imanina, Kafilah. “PENGUNAAN METODE KUALITATIF DENGAN PENDEKATAN DESKRIPTIF ANALITIS DALAM PAUD” (2020). <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/jpaud/article/view/3728>.
- Nasional, Departemen Pendidikan, Fakultas Ekonomi, and Universitas Brawijaya. *Badan Usaha Milik Desa*, 2007.
- Prihatin, Rohani Budi, Mohammad Mulyadi, and Nur Sholikhah Putri Suni. *Editor : Dr. Cucu Nurhayati, M.Si*. Cetakan Pe. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 2, 2018.
- Qonita Azzahra. “Perkembangan Jumlah BUMDes 2014-2020.” *Alinea.Id*. Last modified October 4, 2023. Accessed November 25, 2023. <https://data.alinea.id/perkembangan-jumlah-bumdes-2014-2020-b2c4G98z9b>.
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Edited by Tri Wibowo Budi Santoso. 6th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Sistem Informasi Desa. “BUM Desa Dan BUM Desa Bersama Nasional.” *Sid.Kemendesa.Go.Id*. Last modified October 6, 2023. Accessed November 25, 2023. <https://sid.kemendesa.go.id/bumdes>.
- Umanailo, Muhamad Chairul Basrun. “Kandungan Fungsi Keteraturan Dalam Struktural Fungsional Robert King Merton.” *Sosiologis: Kajian Sosiologi Klasik, Modern dan Kontemporer* 1, no. 4 (2023).